

Analisis Pengeluaran Sektor Pariwisata terhadap Ketimpangan Upah Tenaga Kerja di Indonesia

Analysis of Tourism Sector Expenditures on Inequality of Labor Wages in Indonesia

Lalu Muhammad Azmi Prasetya^{a,*}, M. Pudjihardjo^a, & Nurul Badriyah^a

^a*Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*

[diterima: 10 September 2018 — disetujui: 6 Desember 2018 — terbit daring: 18 Mei 2019]

Abstract

This study analyses the effect of foreign tourist expenditure, government expenditure and foreign investment on wage inequality between skilled, semi-skilled and unskilled labour in the Indonesian tourism sector. The study uses time series data with a period of 22 years. The method used is Error Correction Model (ECM). The results of this study indicate that foreign tourist expenditure and government expenditure increase inequality in the short term, but in the long run can reduce wage inequality. Meanwhile, foreign investment increases inequality both in the short and long term.

Keywords: *tourism sector; wage inequality; skill premium; Error Correction Model (ECM)*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran wisatawan mancanegara, pengeluaran pemerintah dan investasi asing terhadap ketimpangan upah antara tenaga kerja terampil, semi terampil, dan tidak terampil di sektor pariwisata Indonesia. Penelitian menggunakan data *time series* dengan periode waktu 22 tahun. Metode yang digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran wisatawan dan pemerintah meningkatkan ketimpangan dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang mampu menurunkan ketimpangan upah. Investasi asing meningkatkan ketimpangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kata kunci: sektor pariwisata; ketimpangan upah; premi keterampilan; *Error Correction Model* (ECM)

Kode Klasifikasi JEL: F10; J01; Z30

Pendahuluan

Perdagangan pada sektor jasa telah menjadi bagian terpenting di negara-negara berkembang dengan ekspor jasa tumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan dengan majunya ekonomi dunia dan telah tumbuh sepuluh kali lipat sejak 1990 (Loungani *et al.*, 2017). Menurut Cali *et al.* (2008), perdagangan sektor jasa merupakan komponen penting dalam perekonomian dunia, yang berkontribusi langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

dunia serta penciptaan lapangan pekerjaan dan menghasilkan devisa. Berdasarkan penelitian Garson (2015), jasa pariwisata pada tahun 2050 diperkirakan menjadi salah satu sektor terbesar di dunia. *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) (2017) pun menjelaskan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata, sebagai salah satu sektor ekonomi terbesar dan tercepat yang mampu melebihi perdagangan dunia dalam lima tahun terakhir, mampu menunjukkan ketangguhannya pada pelemahan dan ketidakpastian ekonomi global. Chou (2013) pun mengakui bahwa pengembangan pariwisata secara luas adalah instrumen positif untuk men-

*Alamat Korespondensi: Perum. Muslim Pondok Asri, Lombok Barat. E-mail: azmiprasetya19@gmail.com.

dorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan menurut Scheyvens (2002), pariwisata tidak lagi hanya dianggap sebagai penghasil pendapatan, pencipta lapangan kerja, atau fenomena sosial budaya, namun juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong pembangunan yang bermanfaat dan berbasis lokal dalam semua dimensinya.

Menurut Shaw dan Williams (2004), pariwisata mampu mendistribusikan pembangunan dari pusat ekonomi ke daerah tertinggal. Dengan demikian, pengembangan pariwisata cenderung dijadikan instrumen untuk mempersempit ketimpangan, seperti yang dijelaskan oleh Demian (2013) dan Raza dan Shah (2017), bahwa sektor jasa pariwisata adalah sektor penting yang dapat memengaruhi ketimpangan upah. Beberapa negara telah menjadikan pariwisata sebagai sumber utama pembangunan ekonomi dan saling terkait dengan pertumbuhan ekonomi sedemikian rupa sehingga setiap perubahan di dalamnya dapat mempersempit ketimpangan upah di negara tersebut (Lau *et al.*, 2017; Raza *et al.*, 2017; Raza dan Jawaid, 2013; Taylor *et al.*, 2009; Zaman *et al.*, 2016).

Pariwisata mampu menyumbang 10% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dunia tahun 2017 dengan menyediakan satu dari sepuluh kesempatan kerja di dunia. Selain itu, pariwisata juga mampu menghasilkan USD1,4 triliun yang berasal dari ekspor dan menyumbang 7% dari total ekspor dunia dan 30% ekspor jasa. Ekspor jasa pariwisata tersebut merupakan total pengeluaran wisatawan mancanegara di negara tujuan pariwisatanya. Menurut UNWTO (2017), sektor pariwisata di banyak negara berkembang memiliki kategori ekspor tertinggi di dunia, seperti Asia Tenggara yang diperkirakan akan menjadi wilayah dengan pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia sekitar 6,5% sampai 7%. Di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia telah berhasil memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi di tahun 2016 jika dibandingkan dengan Thailand, Singapura, dan Malaysia.

Pertumbuhan penerimaan devisa yang signifikan dari sektor pariwisata, menjadikannya primadona baru bagi pembangunan ekonomi Indonesia sehingga ditetapkan sebagai salah satu sektor unggulan Indonesia yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 bahkan diproyeksikan menjadi penyumbang devisa terbesar pada 2019. Harapannya adalah sektor pariwisata mampu membantu mengurangi ketimpangan ekonomi yang telah terjadi, baik antar-individu, antarwilayah, dan juga antarsektor.

Dumairy (1996) menjelaskan bahwa ketimpangan upah bisa terjadi karena dua hal, yaitu faktor *endowment* dan strategi kebijakan pembangunan. Faktor *endowment* menunjukkan kualitas dari sumber daya manusia, sementara faktor strategi kebijakan pembangunan menunjukkan ke mana arah pembangunan Indonesia di masa depan. Menurut Demian (2013), penjelasan paling sederhana terkait faktor *endowment* adalah kekayaan keluarga yang dapat diandalkan oleh tenaga kerja selama masa studinya atau akses terhadap beasiswa dan lain sebagainya sehingga dapat memengaruhi modal manusia pada tenaga kerja. Secara alamiah, faktor *endowment* tersebut akan mengelompokkan tenaga kerja menjadi tenaga kerja terampil, semi terampil, dan tidak terampil. Pengelompokkan tersebut dapat dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan tenaga kerja. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja lulusan vokasi dan perguruan tinggi, tenaga kerja semi terampil adalah tenaga kerja lulusan menengah atas, dan tenaga kerja tidak terampil merupakan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah pertama ke bawah. Pengelompokkan inilah yang akan menunjukkan adanya perbedaan upah hingga muncul masalah ketimpangan distribusi upah. Hal tersebut juga dijelaskan oleh teori pendekatan modal manusia yang disampaikan oleh Becker (1975), bahwa perbedaan upah tenaga kerja terjadi dikarenakan perbedaan kualitas tenaga kerja.

Apabila ketimpangan upah dianalisis dengan *Edisi Khusus Call for Paper JEPI 2018, hlm. 100-118*

mempertimbangkan kualitas tenaga kerja, maka premi keterampilan berperan sebagai penentu utama pada ketimpangan upah tersebut (*International Monetary Fund/IMF*, 2016). Pengukuran premi keterampilan dilakukan dengan membandingkan rata-rata upah yang diterima oleh tenaga kerja, seperti membandingkan rata-rata upah tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Premi keterampilan Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.

Perbedaan terbesar memang terlihat jelas pada premi keterampilan kelompok pertama, yaitu premi keterampilan Indonesia pada tahun 2008 menunjukkan angka 3,03 yang artinya bahwa rata-rata upah tenaga kerja terampil lebih besar 3,03 kali dibandingkan rata-rata upah tenaga kerja tidak terampil, dan menurun di tahun 2017 menjadi sebesar 2,63 yang artinya bahwa rata-rata upah tenaga kerja terampil hanya lebih besar 2,63 kali dibandingkan rata-rata upah tenaga kerja tidak terampil. Secara keseluruhan, ketiga kelompok premi keterampilan menunjukkan tren yang menurun. Penurunan tersebut diperkirakan karena laju pertumbuhan upah riil pekerja tidak terampil lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, IMF (2016) menjelaskan bahwa ketika premi keterampilan memiliki kecenderungan yang menurun, maka penawaran tenaga kerja terampil semakin meningkat yang tidak diikuti dengan penyerapannya sehingga mengakibatkan upah dari tenaga kerja terampil menjadi turun.

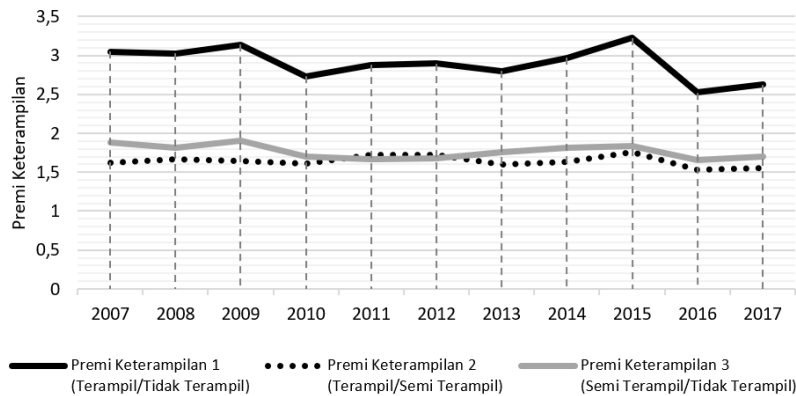
Keadaan tersebut tidak sejalan dengan teori *human capital* yang disampaikan oleh Becker (1975), yang menjelaskan bahwa pemerataan tingkat pendidikan sebagai bagian dari investasi modal manusia akan pemeratakan distribusi pendapatan sehingga ketimpangan akan menurun. Singkatnya, hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja terampil tidak terserap dengan sempurna oleh pasar tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja terampil dapat terjadi apabila teknologi masuk pada suatu negara atau dikenal dengan *skill-biased technological change*, *Edisi Khusus Call for Paper JEPI 2018, hlm. 100-118*

sementara teknologi dapat masuk ketika negara bersangkutan melakukan perdagangan internasional.

Beberapa penelitian pun memang ada yang menunjukkan hubungan positif dan negatif antara perdagangan jasa, khususnya pada sektor pariwisata dan pengaruhnya terhadap ketimpangan. Raza dan Shah (2017) berusaha menguji hubungan antara pariwisata dan ketimpangan pendapatan di 43 negara kunjungan wisatawan tahun 1995 sampai 2015 dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa sektor pariwisata memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu, hipotesis Kuznets juga terbukti dalam penelitiannya yang menyiratkan bahwa apabila pendapatan pariwisata berlipat ganda, maka ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan. Hasil penelitian serupa juga ditemukan oleh Alam dan Paramati (2016) yang meneliti dampak pariwisata terhadap ketimpangan pendapatan pada 49 negara berkembang tahun 1991 sampai 2012.

Lebih spesifiknya, Petit (2016) menjelaskan bahwa total perdagangan internasional secara signifikan dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang antara pekerja terampil dan semi terampil, maupun antara pekerja semi terampil dan pekerja tidak terampil. Berkenaan dengan sektor pariwisata, untuk ketimpangan antara pekerja semi terampil dan pekerja terampil menunjukkan hubungan negatif, sementara ketimpangan antara pekerja semi terampil dan pekerja tidak terampil menunjukkan hubungan positif. Hal tersebut mencerminkan bahwa perbedaan upah pada pekerja tidak terampil yang relatif terhadap pekerja semi terampil yang bekerja di sektor pariwisata mengalami peningkatan dan perbedaan upah antara pekerja terampil dan semi terampil berkurang dari waktu ke waktu. Dengan demikian, sektor pariwisata lebih intens menggunakan pekerja tidak terampil dibandingkan pekerja semi terampil dan terampil.

Selain itu, Engelmann (2014) juga melakukan pe-



Gambar 1: Premi Keterampilan Indonesia 2007–2017

Keterangan: Premi keterampilan 1 : rasio rata-rata upah tenaga kerja terampil dan tidak terampil;
 Premi keterampilan 2 : rasio rata-rata upah tenaga kerja terampil dan semi terampil; dan
 Premi keterampilan 3 : rasio rata-rata upah tenaga kerja semi terampil dan tidak.

Sumber: BPS (2017a, b), data diolah

nelitian untuk mengetahui pengaruh perdagangan internasional terhadap upah riil pekerja terampil, semi terampil, dan tidak terampil pada 11 sektor manufaktur di Inggris. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan struktural dalam ekonomi Inggris yang ditunjukkan pada penurunan permintaan untuk pekerja tidak terampil dan permintaan meningkat untuk pekerja terampil dan semi terampil selama bertahun-tahun.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Cassette *et al.* (2012) berusaha memperkirakan dampak spesifik dari perdagangan internasional terhadap ketimpangan upah dengan menggunakan tiga ukuran upah, yaitu $D9/D1$, $D5/D1$, dan $D9/D5$. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perdagangan internasional pada layanan jasa memiliki dampak positif signifikan pada masing-masing ketiga ukuran upah. Perdagangan internasional jasa juga telah meningkatkan ketimpangan upah antara kelompok upah tertinggi dan upah rata-rata ($D9/D5$). Dalam jangka pendek, perdagangan jasa internasional tidak memiliki dampak signifikan pada ketimpangan. Dalam jangka panjang, perdagangan internasional jasa meningkatkan ketimpangan antara pekerja berupah rendah, menengah, dan tinggi. Hasil utama-

nya menunjukkan bahwa pekerja berupah rendah dan menengah akan merasakan ketimpangan upah yang besar karena adanya perdagangan internasional dibandingkan dengan pekerja berupah tinggi di negara maju.

Tinjauan Literatur

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa perdagangan internasional pada sektor jasa, khususnya pariwisata, mengakibatkan peningkatan ketimpangan upah. Namun, terdapat beberapa penelitian lain yang justru menunjukkan bahwa perdagangan internasional pada sektor pariwisata dapat menurunkan ketimpangan upah. Li *et al.* (2016) melakukan penelitian terkait pariwisata dan ketimpangan upah daerah dengan menggunakan data 30 provinsi di Cina dari tahun 1997 sampai 2010. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pariwisata mampu mengurangi ketimpangan upah dengan peran pariwisata domestik lebih besar dibandingkan dengan pariwisata internasional. Li *et al.* (2015) juga melakukan penelitian di Cina dan menunjukkan bahwa pariwisata dapat memperbaiki keadaan ekonomi di daerah tertinggal

dibandingkan daerah yang maju sehingga pariwisata dapat mengurangi ketimpangan upah yang terjadi di Cina. Sementara itu, Haddad *et al.* (2013) melakukan penelitian terkait di Brazil dan menunjukkan bahwa pariwisata domestik memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan upah di wilayah Brazil.

Berdasarkan serangkaian uraian yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran wisatawan mancanegara, investasi pariwisata, dan pengeluaran pemerintah sektor pariwisata terhadap premi keterampilan sektor pariwisata di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Petit (2017) menjelaskan bahwa keuntungan menggunakan premi keterampilan sebagai ukuran ketimpangan upah adalah bahwa pengaruh yang terlihat lebih mampu menunjukkan suatu kebenaran dan bukan hubungan yang menyesatkan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa liberalisasi pariwisata dapat berdampak pada distribusi upah di sektor pariwisata, yakni antara pekerja yang terampil dan tidak terampil, pekerja terampil dan semi terampil, serta pekerja semi terampil dan tidak terampil.

Dalam penelitian Petit (2017), hubungan langsung antara perdagangan internasional dalam jasa pariwisata dan ketimpangan upah diestimasi dengan memperhitungkan indeks keterbukaan perdagangan sektor pariwisata, inflasi pada sektor pariwisata, *Gross Domestic Product* (GDP) pariwisata, tingkat pendidikan pekerja sektor pariwisata, kepadatan serikat pekerja sektor pariwisata, indeks *Herfindal* pariwisata, dan keterlibatan pemerintah dalam pembentukan upah pariwisata. Namun, beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian Petit (2017) tidak dimasukkan dalam model ini sebab keterbatasan data yang tersedia untuk sektor pariwisata Indonesia.

Selanjutnya, perdagangan internasional dalam penelitian ini diukur dengan pengeluaran wisatawan mancanegara, yang merupakan proksi dari *Edisi Khusus Call for Paper JEPI 2018, hlm. 100-118*

inbound tourism yang menjelaskan keterbukaan perdagangan pada pariwisata yang digunakan oleh Chao *et al.* (2012) dalam Petit (2017) untuk menjelaskan bahwa peningkatan *inbound* pariwisata dapat meningkatkan ketimpangan antara pekerja tidak terampil dan terampil. Pengeluaran wisatawan mancanegara layak diperhitungkan sebab data ini merupakan bagian dari data ekspor pariwisata yang dapat menggambarkan adanya keterbukaan perdagangan di sektor pariwisata.

Selanjutnya, variabel investasi pada sektor pariwisata juga digunakan dalam penelitian sebagai salah satu saran data oleh Petit (2017) yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh ketimpangan di sektor pariwisata. Namun, dalam penelitiannya tidak menggunakan variabel investasi asing sektor pariwisata ini dikarenakan ketidakterediaan data untuk periode penelitian dan sampel negara yang digunakan. Begitu pula hubungan variabel pengeluaran pemerintah dalam sektor pariwisata terhadap ketimpangan upah juga diperhitungkan dalam penelitian Petit (2017) sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini dibentuk dengan mengacu pada penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Petit (2017). Pengukuran alternatif dari pengeluaran wisatawan mancanegara yang dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya pada ketimpangan upah adalah keterbukaan perdagangan dari sektor pariwisata. Pengukuran ini tidak digunakan dalam penelitian karena ketidakterediaan jenis data ini untuk sektor pariwisata Indonesia.

Banyak pengamat menghubungkan peningkatan ketimpangan upah dengan perubahan pada pertumbuhan perdagangan dunia dan khususnya ekspor yang berasal dari negara-negara berkembang (Krugman *et al.*, 2012). Ekspor yang dilakukan negara berkembang, biasanya berteknologi rendah, yang produksinya intensif pada pekerja tidak terampil, sementara ekspor yang dilakukan negara maju biasanya berteknologi tinggi yang produksinya intensif pada pekerja terampil. Keadaan terse-

but disebut sebagai langkah menuju pemerataan harga. Perdagangan antara negara maju yang berlimpah modal dan keterampilan, sementara negara berkembang yang berlimpah pekerja tidak terampil, akan meningkatkan upah pekerja terampil dan menurunkan upah pekerja tidak terampil di negara maju. Hal tersebut sesuai dengan prediksi model faktor proporsi.

Model faktor proporsi juga menjelaskan bahwa perdagangan internasional memengaruhi ketimpangan upah melalui perubahan relatif harga barang. Mayoritas pengamat menjelaskan bahwa teknologi produksi baru memberi penekanan lebih besar pada keterampilan pekerja. Tenaga kerja terampil digunakan untuk menghasilkan barang berteknologi tinggi dan pekerja tidak terampil untuk menghasilkan barang berteknologi rendah.

Garis vertikal pada Gambar 2 menunjukkan rasio upah pekerja terampil terhadap pekerja tidak terampil dan garis horizontal menunjukkan jumlah pekerja terampil terhadap pekerja tidak terampil. Gambar 2 menjelaskan permintaan faktor relatif oleh produsen di antara dua sektor (sektor berteknologi tinggi dan rendah) dengan rasio pekerja terampil terhadap pekerja tidak terampil yang dipekerjakan sebagai fungsi dari rasio upah terampil terhadap pekerja tidak terampil (kurva LL untuk teknologi rendah dan HH untuk teknologi tinggi). Diasumsikan bahwa produksi barang berteknologi tinggi sangat padat karya sehingga kurva HH bergeser relatif terhadap kurva LL.

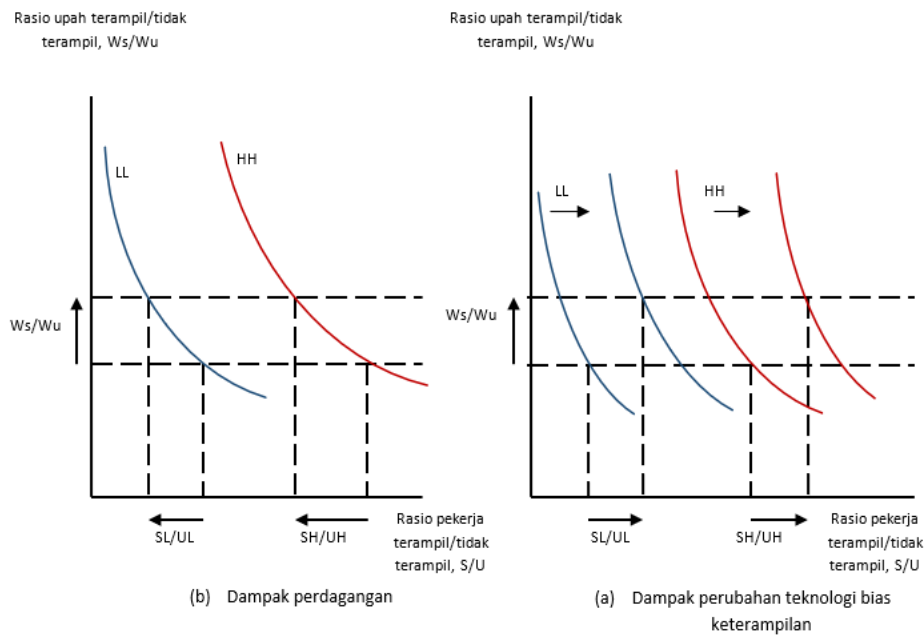
Pada Gambar 2(a), peningkatan perdagangan pada negara berkembang menghasilkan peningkatan pada ketimpangan upah (rasio upah terampil/tidak terampil) di negara tersebut melalui kenaikan harga relatif barang berteknologi tinggi. Kenaikan biaya relatif pekerja terampil mengindikasikan produsen di kedua sektor untuk mengurangi pekerjaan pada relatif pekerja terampil terhadap pekerja tidak terampil.

Pada Gambar 2(b), perubahan teknologi di kedua

sektor menghasilkan peningkatan pada ketimpangan upah. Perubahan teknologi tersebut diklasifikasikan sebagai bias keterampilan karena menggeser permintaan relatif untuk pekerja terampil di kedua sektor (kurva LL dan kurva HH berubah). Kemudian, harga barang berteknologi tinggi dihubungkan dengan rasio upah terampil dan tidak terampil yang lebih tinggi (kurva S bergeser). Dalam hal ini, perubahan teknologi mendorong produsen di kedua sektor untuk meningkatkan penggunaan pekerja terampil dibandingkan pekerja tidak terampil. Oleh karena itu, kelebihan dari perdagangan dibandingkan dengan perubahan teknologi yang bias keterampilan untuk menjelaskan peningkatan ketimpangan upah dapat dilihat dari perubahan penggunaan antara tenaga kerja terampil dan tidak terampil pada sektor-sektor tersebut.

Teori Heckscher-Ohlin (H-O) menjelaskan bahwa ketika negara berkembang membuka diri untuk perdagangan, negara tersebut akan mengekspor barang atau jasa yang relatif intensif pada pekerjaan berketerampilan rendah karena negara-negara berkembang memiliki sejumlah besar tenaga kerja berketerampilan rendah. Selain itu, negara berkembang juga akan melakukan impor pada barang atau jasa yang relatif intensif berketerampilan tinggi. Proses ini tergantung pada fakta bahwa liberalisasi perdagangan akan meningkatkan harga relatif barang atau jasa yang bersifat padat karya dengan keterampilan rendah. Lebih lanjut, teori Stolper-Samuelson membuktikan bahwa reformasi perdagangan dapat mengarah pada penurunan ketimpangan upah antara tenaga kerja terampil dan tidak terampil di negara-negara berkembang, sebab tenaga kerja berketerampilan rendah akan melihat peningkatan upah yang lebih tinggi (Bacchetta *et al.*, 2009).

Teori perdagangan H-O memperjelas hal terkait siapa yang harus diuntungkan dan siapa yang harus merugi dalam perdagangan bebas. Bayangkan jika hanya terdapat dua faktor di dunia, yaitu pekerja terampil dan tidak terampil. Upah relatif dari pekerja



Gambar 2: Rasio Upah Pekerja Ketika Adanya Perdagangan dan Perubahan Teknologi
Sumber: Krugman *et al.* (2012)

terampil akan lebih rendah di negara yang berlimpah tenaga kerja terampil (dinyatakan dengan R dan disebut sebagai negara kaya) daripada di negara yang berlimpah tenaga kerja tidak terampil (dinyatakan dengan P dan disebut sebagai negara miskin) yang dinotasikan dengan $(W_s/W_{us})^R < (W_s/W_{us})^P$, dengan W_s dan W_{us} menunjukkan masing-masing upah pekerja terampil dan tidak terampil. Perbedaan atau ketimpangan inilah yang mendorong keunggulan komparatif, yaitu negara-negara kaya akan mengekspor barang-barang intensif keterampilan, sedangkan negara-negara miskin akan mengekspor barang-barang padat karya tidak terampil. Hasilnya adalah konvergensi harga faktor relatif (atau pemerataan harga) yang ketika suatu negara bergerak menuju perdagangan bebas, maka harga relatif tenaga kerja terampil akan meningkat di negara-negara kaya dan akan menurun di negara-negara miskin (Findlay *et al.*, 2006).

Selanjutnya, perlu diketahui hubungan antara faktor-faktor ekonomi pariwisata terhadap ketim-

Edisi Khusus Call for Paper JEPI 2018, hlm. 100-118

pangan upah, yaitu:

a. Hubungan Antara Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dan Ketimpangan Upah

Sesuai dengan rekomendasi *World Tourism Organization* (WTO) dan *International Union Office Travel Organization* (IUOTO), batasan/definisi wisatawan mancanegara (wisman) adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, dan didorong oleh satu atau beberapa keperluan selain untuk bekerja dengan penduduk di tempat yang dikunjungi. Wisman pada dasarnya dibagi dalam dua golongan:

1. Wisatawan (*Tourist*) yang dimaksud adalah kunjungan seseorang di negara tujuannya yang lebih dari satu hari, namun tidak lebih dari satu tahun, dengan maksud untuk:
 - (a) Kegiatan personal, seperti liburan, berobat, acara keagamaan, belanja, mengunjungi kerabat, transit, dan lainnya.
 - (b) Urusan bisnis dan profesional, seperti

menghadiri acara konser, pertemuan, konferensi, pameran dagang, dan lain-lain.

2. Pelancong (*Excursionist*), yaitu pengunjung yang tinggal di negara yang dituju kurang dari 24 jam, termasuk *cruise passenger* yang berkunjung ke suatu negara dengan kapal pesiar untuk tujuan wisata dengan durasi lebih atau kurang dari 24 jam, tetapi tetap menginap di kapal bersangkutan.

Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke negara yang menjadi destinasi wisata pasti mengeluarkan uangnya untuk belanja. Implikasinya, pemasukan negara menjadi bertambah akibat belanja wisatawan mancanegara di dalam negeri tersebut (Cohen dan Murphy, 1984). Misalnya, pengeluaran wisatawan mancanegara atas produk dan jasa yang dihasilkan di wilayah Indonesia sebagai negara yang dikunjungi tersebut akan dicatat sebagai ekspor pariwisata Indonesia. Semakin besar pengeluaran wisatawan mancanegara, secara tidak langsung pariwisata membuka peluang kerja guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Kebutuhan wisatawan yang beragam tentu menimbulkan usaha yang beragam pula seperti akomodasi, makanan, toko cinderamata, biro perjalanan pariwisata, penyewaan kendaraan, konsultasi pariwisata, dan lain-lain. Kemudian, belanja wisatawan tersebut akan membawa dampak berupa tambahan pemasukan bagi masyarakat setempat sehingga pendapatan masyarakat turut meningkat dan ketimpangan upah tidak akan mengalami peningkatan.

Dari hasil analisis Maulida (2003) terlihat bahwa terdapat kecenderungan distribusi pendapatan yang ditimbulkan oleh ekspor, khususnya ekspor wisatawan, yang justru lebih banyak terserap dalam kelompok pendapatan sedang. Sementara untuk kelompok pendapatan rendah dan tinggi, distribusi pendapatannya terbagi hampir merata.

b. Hubungan Antara Investasi dan Ketimpangan Upah

Investasi merupakan suatu aktivitas penanaman modal dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Investasi ini sangatlah dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi suatu wilayah agar tetap berlangsung. Terkait dengan pariwisata, jenis investasi yang diberikan adalah investasi fisik. Investasi fisik yang dimaksud berupa pembangunan tempat tinggal, pembelian mesin, pembelian kendaraan, pembelian barang modal lainnya, dan non-tempat tinggal seperti hotel, tempat hiburan, kantor, dan lain-lain.

Lebih jelasnya, investasi pariwisata merupakan pengeluaran dengan tujuan pembentukan modal yang dilakukan untuk mendukung sektor pariwisata secara langsung dan tidak langsung. Aktor dalam kegiatan investasi ini merupakan produsen, termasuk pihak swasta. Dalam ilmu ekonomi, teori Harrod-Domar menyampaikan bahwa investasi adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Wahyuni *et al.* (2014), pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Di samping itu, investasi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

c. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Upah

Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pembiayaan pemerintah terkait kebutuhan administrasi pemerintah dan agenda pembangunan. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pariwisata ini meliputi pembinaan, promosi, dan lain-lain. Promosi yang dimaksud terkait dengan periklanan,

Edisi Khusus Call for Paper JEPI 2018, hlm. 100-118

misalnya iklan perhotelan, rumah makan, industri pengolahan yang terkait pariwisata, dan sektor jasa lainnya yang terkait. Seluruh pengeluaran ini akan tertera dalam belanja barang pada pengeluaran rutin pemerintah.

Ketersediaan infrastruktur sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk mendorong produktivitas daerahnya serta menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Faktor pendorong produktivitas suatu daerah salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi (Awandari & Indrajaya, 2016). Tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja, serta dengan adanya fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investasi di masing-masing daerah yang akan mampu mempercepat pembangunan ekonomi sehingga akhirnya akan mengurangi tingkat ketimpangan yang ada (Putri & Natha, 2014).

Metode

Berdasarkan pada permasalahan dan paparan di bagian Pendahuluan, pendekatan untuk jenis penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersifat *time series* dari tahun 1996–2017 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), dan *World Travel & Tourism Council* (WTTC). Sampel yang dipilih adalah pekerja sektor pariwisata di Indonesia. Data *time series* dengan 22 observasi ini tergolong dalam *small sample* (stata.com, 2005). *Edisi Khusus Call for Paper JEPI 2018, hlm. 100-118*

Untuk menghindari adanya masalah dalam estimasi karena minimnya data yang digunakan, akan dilakukan uji asumsi klasik untuk data dalam penelitian ini. *Pertama*, uji multikolinearitas dengan menggunakan *varians inflation factors* (VIF). Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas, yang untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas, digunakan prosedur yang berdasarkan matriks deviasi standar White (Uji White). Terakhir, data akan diuji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Error Correction Model* (ECM) karena sesuai dengan tujuan penelitian dan data yang digunakan. Selain itu, metode ini digunakan juga karena memenuhi beberapa asumsi yang perlu dipenuhi untuk data *time series*. Penggunaan metode ini juga didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Petit (2017) dengan 26 tahun observasi, bahwa penggunaan model ini baik untuk menjelaskan pengaruh perdagangan pariwisata. Hasil penelitiannya pun menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan pariwisata dapat meningkatkan ketimpangan dalam jangka pendek antara pekerja yang sangat terampil dan tidak terampil serta antara pekerja semi terampil dan tidak terampil.

Analisis data dilakukan dengan metode ECM untuk mengidentifikasi hubungan jangka panjang dan pendek yang terjadi karena adanya kointegrasi di antara variabel penelitian. Sebelum melakukan estimasi ECM, perlu dilakukan uji stasioneritas data, menentukan panjang *lag*, dan uji derajat kointegrasi. Analisis dengan menggunakan ECM ini harus memenuhi persyaratan bahwa data tidak stasioner pada tingkat level dan terdapat keseimbangan dalam jangka panjang. Secara ekonomi, model yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = f(X1_t, X2_t, X3_t)$$

dengan i adalah premi keterampilan dan t adalah tahun.

Berdasarkan tujuan penelitian, metode analisis

yang akan digunakan dalam penelitian adalah ECM dengan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\Delta Y_{i,t} = & \alpha_0 \Delta Y_{i,t-1} + \alpha_1 \Delta X_{1,t} + \alpha_2 \Delta X_{1,t-1} \\ & + \alpha_3 \Delta X_{2,t} + \alpha_4 \Delta X_{2,t-1} + \alpha_5 \Delta X_{3,t} \\ & + \alpha_6 \Delta X_{3,t-1} + \alpha_7 ECT_{t-1} + \mu_t\end{aligned}$$

Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\Delta SP_{i,t} = & \alpha_0 \Delta SP_{i,t-1} + \alpha_1 \Delta PW_{1,t} + \alpha_2 \Delta PW_{1,t-1} \\ & + \alpha_3 \Delta PP + \alpha_4 \Delta PP_{2,t-1} + \alpha_5 \Delta I_{3,t} \\ & + \alpha_6 \Delta I_{3,t-1} + \alpha_7 ECT_{t-1} + \mu_t\end{aligned}\quad (1)$$

Perhitungan *error correction term* (ECT) dalam penelitian dilakukan berdasarkan persamaan berikut:

$$ECT = X_{1,t-1} + X_{2,t-1} + X_{3,t-1}\quad (2)$$

dengan Y adalah premi keterampilan; PW adalah pengeluaran wisman; I adalah investasi; PP adalah pengeluaran pemerintah; i adalah kelompok 1,2,3; t adalah tahun; α adalah koefisien; ECT adalah *error correction term*; dan μ adalah *error term*. Beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam analisis ECM adalah sebagai berikut:

a. Uji Akar Unit

Apabila dalam uji akar unit terhadap *level series* menerima hipotesis adanya akar unit, yang berarti bahwa pada tingkat tersebut bersifat tidak stasioner sehingga langkah selanjutnya adalah melakukan uji akar unit terhadap *first difference* dari *series*. Apabila hasilnya menolak adanya akar unit, maka pada tingkat *first difference* sudah stasioner dan terintegrasi pada orde I(1). Apabila hasil uji menerima adanya akar unit, langkah selanjutnya adalah melakukan diferensiasi kembali terhadap *series* sampai stasioner.

b. Uji Derajat Kointegrasi

Pada prinsipnya, dalam melakukan estimasi pada suatu model, ada dua kasus yang berlaku umum, di antaranya:

1. Apabila hasil uji akar unit pada variabel menunjukkan bahwa tidak terdapat akar unit, maka interpretasi pada model ini cukup dilakukan seperti regresi sederhana karena perilaku data yang menunjukkan I(0) tidak membutuhkan analisis *time series* lebih lanjut.
2. Apabila hasil uji akar unit pada seluruh variabel dalam suatu model berada pada orde yang sama, misalnya I(1), sedangkan hasil regresi mengandung *stochastic trend* (residual tidak stasioner), maka hasil regresi ini akan menghasilkan *spurious regression*. Untuk menghindari hal tersebut, maka variabel tersebut perlu diestimasi dalam format turunan pertama. *Spurious regression* timbul karena perilaku data sesungguhnya tidak hanya menggambarkan perilaku sederhana yang hanya dapat dijelaskan sebagaimana I(0), namun menunjukkan adanya dampak yang semu apabila diregresi dengan teknik sederhana.

Apabila hasil uji semua variabel dalam model menunjukkan integrasi pada orde yang sama, misalnya I(1), sedangkan residual hasil regresi tersebut stasioner pada I(0), maka variabel-variabel tersebut terko-integrasi. Keadaan ini menunjukkan tidak adanya *spurious regression* karena diperoleh informasi adanya *co-movement (co-integration)* dari data *time series* sebagai bentuk adanya penyesuaian yang terus terjadi pada data *time series*.

c. Uji Kointegrasi

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya ko-integrasi atau hubungan keseimbangan jangka panjang antara dua variabel atau lebih adalah dengan metode Engle Granger (EG). Untuk melakukan uji kointegrasi EG, perlu dilakukan regresi persamaan jangka panjangnya terlebih dahulu. Residual tersebutlah yang dikenal dengan ECT. Apabila ECT stasioner, maka variabel dependen dan independen dapat dikatakan saling berko-integrasi.

d. ECM

Persamaan jangka panjang yang diberikan oleh model ECM menunjukkan suatu hubungan pendugaan terhadap variabel dependen yang ditentukan oleh regresor sehingga diperlukan serangkaian pengujian ekonometrika, yaitu (1) hubungan variabel melalui uji kointegrasi; (2) analisis model pada persamaan jangka panjang; dan (3) analisis pada parameter (α dan β).

Persamaan jangka pendek menunjukkan suatu penyimpangan antara nilai aktual variabel dependen dengan tren variabel dependen. Penyimpangan terjadi pada setiap waktu observasi sehingga disebut sebagai persamaan jangka pendek. Beberapa pengujian ekonometrika pada persamaan jangka pendek yaitu analisis model pada persamaan jangka pendek dan analisis parameter (δ) serta mekanisme dinamisasi *difference* variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil dan Analisis

Berdasarkan model ekonometri yang telah dibahas, maka analisis hasil penelitian dan pembahasan akan ditampilkan berdasarkan hasil akhir data-data yang telah melalui uji stasioneritas yang merupakan uji prasyarat bagi data *time series*, yaitu mencakup uji akar-akar unit dan uji derajat integrasi. Selanjutnya dilakukan uji kointegrasi, estimasi persamaan jangka panjang dan estimasi persamaan jangka pendek dengan model koreksi kesalahan atau ECM untuk pengolahan data dalam penelitian digunakan perangkat lunak *Stata 13.1*.

Pertama, hasil uji asumsi klasik dalam data tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas dari masing-masing variabel dengan pertimbangan bahwa nilai VIF tidak lebih dari 10. *Kedua*, uji heterokedastisitas juga tidak ditemukan adanya permasalahan dengan ketentuan nilai probabilitas yang lebih besar dari derajat kepercayaan 95%. Dalam uji autokorelasi juga tidak ditemukan adanya

Edisi Khusus Call for Paper JEPI 2018, hlm. 100-118

hubungan antara eror pada setiap anggota *series* dengan ketentuan $dU < DW < 4 - dU$.

Sebelum melakukan uji ECM, perlu dilakukan uji stasioneritas terlebih dahulu. Uji stasioneritas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pengukuran Phillips-Perron karena pengukuran ini memasukkan unsur perubahan struktural yang terjadi di dalam data (Ekananda, 2015). Berdasarkan hasil uji stasioneritas pada masing-masing variabel diperoleh nilai probabilitas yang tidak stasioner pada tingkat level, seperti yang terlihat pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa hanya variabel SP1 (premi keterampilan 1) yang stasioner pada tingkat level dengan pertimbangan nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai kritis pada tingkat keyakinan 5%. Penggunaan metode kointegrasi tetap dimungkinkan walaupun terdapat variabel yang sudah stasioner pada tingkat level. Sementara dalam bentuk *first difference*, ditemukan variabel SP1, SP2 (premi keterampilan 2), SP3 (premi keterampilan 3), PW (pengeluaran wisatawan), PP (pengeluaran pemerintah), dan I (investasi) stasioner secara bersama-sama.

Setelah melakukan uji stasioneritas, perlu dilakukan uji kointegrasi untuk menunjukkan sejauh mana hubungan keseimbangan antarvariabel dalam jangka panjang. Untuk menguji ada tidaknya kointegrasi digunakan uji Engle Granger-Phillips Peron. Metode pengujian dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan mengestimasi model regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Tahap selanjutnya dilakukan dengan menguji stasioneritas residual hasil regresi dengan menggunakan Phillips Peron. Uji kointegrasi berdasarkan prosedur Engle-Granger mensyaratkan residual dari persamaan jangka panjang stasioner pada tingkat level.

Tabel 2 menunjukkan bahwa residual dari persamaan ketimpangan upah menolak hipotesa nol (H_0) yang menyatakan bahwa residual tersebut stasioner di tingkat level. Hal tersebut dapat dilihat

Tabel 1: Hasil Uji Stasioneritas

Variabel	SP1		SP2		SP3	
	Level (Prob.)	First Difference (Prob.)	Level (Prob.)	First Difference (Prob.)	Level (Prob.)	First Difference (Prob.)
SP	0,0139	0,0000	0,0076	0,0000	0,0758	0,0000
PW	0,4773	0,0000	0,4773	0,0000	0,4773	0,0000
PP	0,9965	0,0023	0,9965	0,0023	0,9965	0,0023
I	0,9571	0,0186	0,9571	0,0186	0,9571	0,0186

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 2: Hasil Uji Kointegrasi

Nilai Prob.	Ketimpangan Upah 1	Ketimpangan Upah 2	Ketimpangan Upah 3
	0,0000	0,0000	0,0020

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

dari nilai probabilitas yang kurang dari 0,05 pada tingkat keyakinan 5%. Artinya, residual dari regresi persamaan ketimpangan upah sudah stasioner atau tidak memiliki unit akar di tingkat level sehingga persamaan jangka panjang terdapat kointegrasi di tingkat kepercayaan 5%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam jangka panjang, variabel ketimpangan upah (SP1, SP2, dan SP3) dipengaruhi oleh pengeluaran wisatawan, pengeluaran pemerintah, dan investasi di masa yang akan datang.

Selanjutnya, estimasi dapat dilanjutkan untuk membentuk persamaan jangka pendeknya. Sebab setiap data yang tidak stasioner pada tingkat level atau data terkointegrasi dalam *first difference* selalu memiliki pergerakan jangka pendek sehingga model dinamis yang cocok untuk mencari keseimbangan jangka pendek adalah model koreksi kesalahan (ECM). Selanjutnya, model ECM menjadi model yang valid apabila variabel-variabel yang berkointegrasi tersebut didukung oleh ECT yang signifikan secara statistik. Hasil regresi persamaan ketimpangan upah jangka pendek dengan menggunakan pendekatan ECM dapat dilihat pada Tabel 3.

Hasil estimasi mengindikasikan bahwa secara statistik, koefisien kesalahan keseimbangan (*equilibrium error*) berpengaruh signifikan yang berarti bahwa dalam jangka pendek, ketimpangan upah

(SP1) menyesuaikan perubahan dari ketiga variabel yang digunakan pada periode berikutnya. Atau dapat pula dikatakan bahwa penyesuaian satu periode berikutnya untuk menuju keseimbangan jangka panjang menjadi cukup penting sebab nilai koreksi untuk penyesuaian mencapai 106,7%. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan upah saat ini berada pada tingkat di atas nilai keseimbangan jangka panjangnya sehingga setiap tahun akan dikoreksi rata-rata sebesar 106,7% untuk mencapai nilai keseimbangan.

Berdasarkan hasil uji ukuran ketimpangan upah pertama, didapatkan koefisien determinasi yang menunjukkan kuatnya hubungan regresi sebesar 0,705, yang artinya 70,5% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dependen dalam model tersebut. Untuk menguji tingkat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,0004 yang lebih kecil dari 5% (untuk tingkat keyakinan 95%), maka H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Selanjutnya, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu dapat dilihat dari nilai probabilitas t-statistik. Pada persamaan ketimpangan upah pertama, nilai probabilitas koefisien variabel pengeluaran wisatawan dan

Tabel 3: Hasil Regresi ECM

Variabel	SP1		SP2		SP3	
	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.
C	-0,148	0,078	-0,0301	0,274	-0,0325	0,129
D(PW)	0,00000629	0,335	0,00000239	0,550	0,00000161	0,343
D(PP)	0,00016	0,201	0,0000523	0,481	0,00004	0,204
D(I)	0,00000938	0,041	0,00000366	0,178	0,00000162	0,161
ECT(-1)	-1,067	0,000	-1,137	0,000	-0,8645	0,001
<i>R-squared</i>	0,705		0,616		0,586	
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,0004		0,0028		0,005	

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

pengeluaran pemerintah lebih besar dari tingkat keyakinan 5% sehingga pengaruhnya tidak signifikan terhadap ketimpangan upah. Sementara variabel investasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketimpangan upah.

Pada ukuran ketimpangan upah kedua, nilai koreksi untuk penyesuaian mencapai 113,7%. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan upah saat ini berada pada tingkat di atas nilai keseimbangan jangka panjangnya, sehingga setiap tahun akan dikoreksi rata-rata sebesar 113,7% untuk mencapai nilai keseimbangan. Berdasarkan hasil uji ukuran ketimpangan upah kedua, didapatkan koefisien determinasi yang menunjukkan kuatnya hubungan regresi sebesar 0,616, yang artinya 61,6% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dependen dalam model tersebut.

Pada persamaan ketimpangan upah kedua, nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,0028 yang lebih kecil dari 5% (untuk tingkat keyakinan 95%), maka H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Sementara secara individu, nilai probabilitas koefisien variabel independen lebih besar dari tingkat keyakinan 5% sehingga tidak terdapat hubungan secara signifikan terhadap ketimpangan upah.

Pada ukuran ketimpangan upah ketiga, nilai koreksi untuk penyesuaian mencapai 86,45% yang menunjukkan bahwa ketimpangan upah saat ini berada pada tingkat di atas nilai keseimbangan jangka panjangnya sehingga setiap tahun akan di-

koreksi rata-rata sebesar 86,45% untuk mencapai nilai keseimbangan. Berdasarkan hasil uji ukuran ketimpangan upah ketiga, didapatkan koefisien determinasi yang menunjukkan kuatnya hubungan regresi sebesar 0,586, yang artinya 58,6% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dependen dalam model tersebut.

Pada persamaan ketimpangan upah ketiga, nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 5% (untuk tingkat keyakinan 95%), maka H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Sementara secara individu, nilai probabilitas koefisien variabel independen lebih besar dari tingkat keyakinan 5% sehingga tidak terdapat hubungan secara signifikan terhadap ketimpangan upah.

Pengaruh Pengeluaran Wisatawan terhadap Ketimpangan Upah

Berdasarkan persamaan jangka panjang diketahui bahwa pengeluaran wisatawan mancanegara berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap ketimpangan upah pertama, kedua, dan ketiga. Apabila melihat pengaruhnya dalam jangka pendek, diketahui bahwa pengeluaran wisatawan mancanegara berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap ketimpangan upah pertama, kedua, dan ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran wisatawan mancanegara tidak cukup mampu untuk menjelaskan pengaruhnya pada ke-

Tabel 4: Hasil Uji Persamaan Jangka Panjang

Variabel	SP1		SP2		SP3	
	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.
C	3,392	3,392	2,096	2,096	1,630	1,630
PW	-0,0000881	0,167	-0,0000263	0,439	-0,0000253	0,128
I	0,000008	0,011	0,0000411	0,016	-0,00000878	0,249
PP	-0,00005	0,129	-0,0000379	0,039	0,00000412	0,619
<i>R-squared</i>	0,358		0,298		0,326	
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,042		0,088		0,0630	

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

timpangan upah yang terjadi dalam sektor pariwisata Indonesia. Sementara terdapat variabel lain di luar model yang memiliki pengaruh lebih besar pada ketimpangan upah pekerja di sektor pariwisata Indonesia.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pariwisata terhadap Ketimpangan Upah

Berdasarkan persamaan jangka panjang diketahui bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ketimpangan upah kedua, yaitu antara pekerja terampil dan semi terampil. Sementara itu, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap ketimpangan upah pertama dan ketiga. Sementara berdasarkan persamaan jangka pendek, diketahui bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap ketimpangan upah pertama, kedua, dan ketiga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pengeluaran pemerintah untuk sektor pariwisata ini dapat menurunkan ketimpangan upah, khususnya antara pekerja terampil dan semi terampil. Keadaan ini mencerminkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pariwisata lebih menyukai pekerja semi terampil.

Pengeluaran pemerintah yang terjadi di sektor pariwisata merupakan faktor penentu untuk mencapai perdagangan jasa pariwisata yang lebih tinggi disertai dengan ketimpangan upah yang lebih rendah dalam jangka panjang. Hal inilah yang me-

nyebabkan kuantitas dan kualitas pengeluaran pemerintah, yaitu infrastruktur, berpengaruh negatif terhadap ketimpangan upah melalui liberalisasi perdagangan (Raychaudhuri dan De, 2016). Lebih lanjut, pengaruh pengeluaran pemerintah pada premi keterampilan tergantung pada intensitas faktor produksi. Dalam jangka panjang, apabila lebih banyak menggunakan tenaga kerja semi terampil, akan ada arus modal keluar dari kelompok tenaga kerja terampil ke kelompok tenaga kerja semi terampil sehingga tingkat upah tenaga kerja terampil akan menurun dan upah tenaga kerja semi terampil akan meningkat. Hal ini akan mengurangi ketimpangan upah antara tenaga kerja terampil dan semi terampil dalam jangka panjang. Tentu saja dampaknya akan berbeda jika dalam jangka pendek lebih banyak tenaga kerja terampil yang digunakan dalam pengembangan pariwisata yang digarap oleh pemerintah, maka ketimpangan upah akan mengalami peningkatan (Pi dan Zhou, 2012).

Berdasarkan pemaparan tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah dapat menghasilkan dampak yang berbeda tergantung pada dominasi faktor input yang digunakan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang bias. Apabila pengeluaran pemerintah untuk sektor pariwisata adalah pada tenaga kerja terampil, akan meningkatkan ketimpangan upah. Namun, jika pengeluaran pemerintah untuk sektor pariwisata adalah pada tenaga kerja semi terampil, akan menurunkan ketimpangan upah sehingga ketergantungan relatif pada tenaga kerja tersebut bagi pengeluaran pemerintah merupakan penentu yang

penting dalam ketimpangan upah. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga merupakan faktor penentu keunggulan komparatif ekonomi (Pi dan Zhang, 2018; Anwar, 2008). Pengeluaran pemerintah merupakan penyeimbang dalam distribusi upah ketika perdagangan internasional dilakukan (Krugman, 2018).

Pengaruh Investasi Asing terhadap Ketimpangan Upah

Berdasarkan persamaan jangka panjang diketahui bahwa investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketimpangan upah pertama dan kedua. Sementara itu, investasi berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap ketimpangan upah ketiga. Berdasarkan persamaan jangka pendek diketahui bahwa investasi berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap ketimpangan upah pertama, kedua, dan ketiga.

Data investasi asing pada sektor pariwisata yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan investasi asing sejak periode 1996 sampai 2017 di sektor pariwisata. Dalam jangka pendek, investasi asing dapat meningkatkan ketimpangan upah secara tidak signifikan antara kelompok tenaga kerja terampil dan tidak terampil, kelompok terampil dan semi terampil, serta kelompok semi terampil dan tidak terampil. Sementara dalam jangka panjang, investasi asing dapat meningkatkan ketimpangan upah secara signifikan antara kelompok tenaga kerja terampil dan tidak terampil, serta kelompok tenaga kerja terampil dan semi terampil.

Hal ini disebabkan oleh karakteristik investasi asing berkaitan dengan perubahan teknologi yang bias keterampilan. Implikasinya adalah investasi asing akan meningkatkan permintaan untuk tenaga kerja yang lebih terampil di negara-negara berkembang (Alili, 2015; Peluffo, 2015). Pengaruh investasi asing pada pasar tenaga kerja adalah meningkatkan ketimpangan upah, sebab menuntut tenaga kerja

yang lebih terampil atau hanya meningkatkan upah rata-rata secara keseluruhan. Investasi asing dalam penelitian Zulfiu-Alili (2014) dapat meningkatkan ketimpangan upah lebih tinggi dibandingkan dengan investasi yang berasal dari dalam negeri. Investasi asing dapat meningkatkan ketimpangan upah di negara berkembang berpendapatan rendah, tetapi tidak di negara berkembang berpendapatan tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh negara berkembang berpendapatan rendah yang sering mengalami krisis ekonomi (Hazama, 2017).

Selanjutnya, dalam dua dekade ini terlihat bahwa ketimpangan upah antarkelompok pekerja pada sektor pariwisata terus mengalami penurunan. Penurunan ketimpangan upah ini disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja yang lebih terampil dalam sektor pariwisata Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dalam sektor pariwisata dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja terampil. Semakin banyak tenaga kerja terampil yang terserap, maka distribusi upah kelompok teratas akan semakin menuju pemerataan. Namun, ternyata liberalisasi yang ditunjukkan oleh masuknya investasi asing ke sektor pariwisata Indonesia tetap akan terus mengakibatkan peningkatan ketimpangan upah di antara kelompok tenaga kerja. Jika investasi asing memang hanya menyukai tenaga kerja terampil dan tidak dapat menerima tenaga kerja terampil yang tersedia di Indonesia, maka hal ini menunjukkan bahwa keterampilan tenaga kerja Indonesia tidak dapat mengimbangi permintaan keterampilan yang berasal dari luar Indonesia. Seperti halnya yang dijelaskan dalam teori faktor proporsi Heckscher-Ohlin-Samuelson, yang dikembangkan kembali oleh Krugman (2012), bahwa ketika suatu negara yang terbuka memiliki penawaran sumber daya yang relatif melimpah (tenaga kerja dari dalam negeri dan modal dari luar negeri), maka negara tersebut akan memperoleh keuntungan dari liberalisasi perdagangan yang terjadi. Namun, ketika penawaran sumber daya yang dimiliki suatu

negara relatif kecil (modal dari dalam negeri dan tenaga kerja dari luar negeri), maka negara tersebut akan cenderung memperoleh sedikit manfaat dari kegiatan perdagangan yang dilakukan.

Tetapi kenyataannya, sektor pariwisata menerima modal dari luar negeri dengan sumber daya manusia yang sebagian besar tidak terampil. Modal dari luar negeri ini memang dikenal akan mengakibatkan terjadinya perubahan teknologi ataupun kemajuan teknologi sehingga semakin besar investasi asing yang masuk, semakin tinggi pula ketimpangan upah yang terjadi karena hanya tenaga kerja terampil dan *up to date* yang diminta. Dalam konteks globalisasi, dengan teknologi, tuntutan pasar, dan hubungan perdagangan yang berubah dengan cepat, serta responsif pada keterampilan, akan menjadikan perubahan permintaan yang ada dan potensial saat ini. Keadaan ini menunjukkan bahwa investasi asing yang masuk juga akan menggeser permintaan untuk menjadi lebih beragam jenisnya, termasuk di sektor pariwisata ini. Hal ini tentunya juga dikarenakan adanya perubahan teknologi.

Keterampilan adalah salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan perdagangan dan diversifikasi ekonomi yang dalam hal ini merupakan pelengkap penting untuk pembangunan infrastruktur. Selama dua dekade ini, Indonesia memang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja yang terampil, bahkan tidak sedikit yang menganggur. Namun, menjadi tenaga kerja yang terampil saja tidaklah cukup dalam pasar tenaga kerja saat ini. *Manpowergroup's 2017 Talent Shortage Survey* menemukan bahwa 40% pengusaha melaporkan kesulitan dalam menemukan tenaga kerja terampil di Indonesia. Begitu pula dalam laporan *World Economic Forum 2016, The Future of Jobs* yang menemukan bahwa pada 2020 di semua jenis pekerjaan, secara rata-rata lebih dari sepertiga keterampilan inti yang dibutuhkan untuk melakukan sebagian besar pekerjaan akan terdiri dari keterampilan yang saat ini belum dianggap penting dalam pekerjaan. Hal ini menyiratkan

bahwa jenis keterampilan yang dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja berubah dengan cepat sehingga dapat dikatakan bahwa penawaran tenaga kerja terampil di Indonesia masih belum mampu memenuhi permintaan tenaga kerja terampil yang ada di sektor pariwisata karena perubahan permintaan keterampilan yang berlangsung dengan cepat. Dengan kata lain, perubahan teknologi akan mengarah pada perubahan permintaan keterampilan tenaga kerja tersebut.

Keadaan demikian dijelaskan dalam teori *race education* oleh Tinbergen yang menunjukkan ketimpangan sebagai perlombaan antara pendidikan dan teknologi (Broecke *et al.*, 2016). Menurut pandangan Tinbergen dalam idenya terkait *education race*, tingkat pengembalian pendidikan akan meningkat ketika tingkat perkembangan teknologi telah melebihi pertumbuhan angkatan kerja berpendidikan dan ketika produksi pendidikan telah melampaui kemajuan teknologi. Tinbergen selalu menganggap bahwa perubahan teknologi yang terjadi akan selalu membutuhkan keterampilan baru (Autor, 2012) dan begitu pula peningkatan jumlah pekerja terampil akan mendorong pengembangan teknologi (Lee dan Wie, 2015) sehingga untuk menghindari terjadinya peningkatan ketimpangan upah perlu penawaran keterampilan yang memenuhi permintaan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, dalam jangka pendek, peningkatan pengeluaran wisatawan mancanegara dapat meningkatkan ketimpangan upah antarkelompok pekerja dan dalam jangka panjang, akan berlaku hal sebaliknya. Namun, pengeluaran wisatawan mancanegara tidak cukup mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap ketimpangan upah. *Kedua*, dalam jangka pendek maupun panjang, peningkatan investasi asing dapat mening-

katkan ketimpangan upah antarkelompok pekerja. Namun, investasi asing pada sektor pariwisata signifikan memengaruhi ketimpangan upah dalam jangka panjang, khususnya antara pekerja terampil dan tidak terampil serta antara tenaga kerja terampil dan semi terampil. Penyebabnya adalah peningkatan investasi akan mendorong kemajuan teknologi dan akan meminta tenaga kerja terampil yang lebih banyak lagi, yang mana kemajuan teknologi ini terus terjadi seiring dengan bertambahnya waktu dan akan terus mengubah kriteria keterampilan bagi tenaga kerja.

Ketiga, dalam jangka pendek, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan ketimpangan upah antara kelompok tenaga kerja. Sementara dalam jangka panjang, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menurunkan ketimpangan upah antara kelompok tenaga kerja. Namun, pengaruhnya yang negatif signifikan dalam jangka panjang tersebut hanya terjadi di antara pekerja terampil dan semi terampil. Hal ini disebabkan karena peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pariwisata lebih menguntungkan tenaga kerja semi terampil.

Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah perlunya kebijakan yang tepat untuk merespons ketimpangan upah di sektor pariwisata Indonesia, yakni dengan meningkatkan akses pendidikan sebagai prioritas yang juga perlu didampingi dengan pelatihan karena penawaran tenaga kerja di Indonesia yang belum responsif terhadap permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan maupun bantuan dari pemerintah untuk menyediakan berbagai program yang mampu memberikan *reskilling* dan *upskilling* bagi semua tenaga kerja termasuk pekerja yang sudah terampil saat ini, khususnya dengan fokus pada *science, technology, engineering dan mathematics* (STEM). Hal ini dianggap perlu karena perdagangan interna-

Edisi Khusus Call for Paper JEPI 2018, hlm. 100-118

sional secara tidak langsung membawa perubahan teknologi yang akan mengakibatkan perubahan permintaan karakteristik tenaga kerja terjadi secara cepat.

Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melihat penyebab ketimpangan upah tenaga kerja sektor pariwisata Indonesia dari sisi penawaran tenaga kerja untuk memahami lebih baik karakteristik tenaga kerja sektor pariwisata.

Daftar Pustaka

- [1] Alam, M. S., & Paramati, S. R. (2016). The impact of tourism on income inequality in developing economies: Does Kuznets curve hypothesis exist?. *Annals of Tourism Research*, 61, 111–126. doi: <https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.09.008>.
- [2] Alili, M. Z. (2015). An empirical investigation of the effects of foreign direct investment on the skill intensity of host country employment. *Procedia Economics and Finance*, 26, 623–629. doi: [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00799-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00799-6).
- [3] Anwar, S. (2008). Labor inflow induced wage inequality and public infrastructure. *Review of Development Economics*, 12(4), 792–802. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2008.00453.x>.
- [4] Autor, D. (2012, February). Lecture 1 – The theory of skill premia, Part I: Laying out facts and clearing empirical underbrush. *Course 14.662-Spring 2012*. Massachusetts Institute of Technology. Diakses 25 Juli 2018 dari <https://pdfs.semanticscholar.org/8826/56b8c3df902e8fd2cbbd8d5f6a8d38a2f611.pdf>.
- [5] Awandari, L. P. P., & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 1435–1462.
- [6] Bacchetta, M., Ernst, E., & Bustamante, J. P. (2009). *Globalization and informal jobs in developing countries*. Geneva: International Labour Organization and World Trade Organization. Diakses 7 September 2018 dari https://www.wto.int/english/res_e/booksp_e/jobs_devel_countries_e.pdf.
- [7] Becker, G. S. (1975). *Human Capital (2nd edition)*. New York: Columbia University Press.
- [8] BPS. (2017a). *Gini ratio provinsi 2002–2018*. Badan Pusat Statistik. Diakses 23 September 2017 dari <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2017/04/26/1116/gini-ratio-provinsi-2002-2017.html>.
- [9] BPS. (2017b). *Keadaan pekerja di Indonesia Februari 2017*. Badan Pusat Statistik. Diakses 20 September 2017 dari <https://www.bps.go.id/>

- publication/2017/08/03/184dafb04f72b286f8f16e02/keadaan-pekerja-di-indonesia-februari-2017.html
- [10] Broecke, S., Quintini, G., & Vandeweyer, M. (2016). Wage inequality and cognitive skills: Re-opening the debate. *NBER Working Paper*, 21965. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Diakses 25 Juli 2018 dari <http://www.nber.org/papers/w21965>. doi: 10.3386/w21965.
- [11] Cali, M., Ellis, K., & te Velde, D. W. (2008). The contribution of services to development and the role of trade liberalisation and regulation. *ODI Working Paper*, 298. London: Overseas Development Institute.
- [12] Cassette, A., Fleury, N., & Petit, S. (2012). Income inequalities and international trade in goods and services: Short- and long-run evidence. *The International Trade Journal*, 26(3), 223–254. doi: <https://doi.org/10.1080/08853908.2012.682023>.
- [13] Chou, M. C. (2013). Does tourism development promote economic growth in transition countries? A panel data analysis. *Economic Modelling*, 33, 226–232. doi: <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.04.024>.
- [14] Cohen, B., & Murphy, G. L. (1984). Models of concepts. *Cognitive Science*, 8(1), 27–58. doi: <https://doi.org/10.1207/s15516709cog08012>.
- [15] Demian, C. V. (2013). Trade, the skill premium and global inequality. *Paper presented at ETSG 2013 Birmingham, Fifteenth Annual Conference, 12-14 September 2013, University of Birmingham*. European Trade Study Group (ETSG). Diakses 27 Desember 2017 dari <http://www.etsg.org/ETSG2013/Papers/348.pdf>.
- [16] Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- [17] Ekananda, M. (2015). *Ekonometrika dasar untuk penelitian dibidang ekonomi, sosial dan bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [18] Engelmann, S. (2014). International trade, technological change and wage inequality in the UK economy. *Empirica*, 41(2), 223–246. doi: <https://doi.org/10.1007/s10663-013-9209-z>.
- [19] Findlay, R., Henriksson, R. G. H., Lindgren, H., & Lundahl, M. (ed.) (2006). *Eli Heckscher, international trade, and economic history*. London: The MIT Press.
- [20] Garson, G. D. (2015). *GLM multivariate, MANOVA, and canonical correlation*. Statistical Associates Publishing.
- [21] Haddad, E. A., Porsse, A. A., & Rabahy, W. (2013). Domestic tourism and regional inequality in Brazil. *Tourism Economics*, 19(1), 173–186. doi: <https://doi.org/10.5367/2Fte.2013.0185>.
- [22] Hazama, Y. (2017). The impact of exports on income inequality in developing countries. *IDE Discussion Paper*, 650. Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (JETRO).
- [23] IMF. (2016, April). *Regional economic outlook: Asia and Pacific: Building on Asia's strengths during turbulent times*. World economic and financial surveys. International Monetary Fund. Diakses 27 Desember 2017 dari <https://www.imf.org/en/Publications/REO/APAC/Issues/2017/03/06/Building-on-Asia-s-Strengths-during-Turbulent-Times>.
- [24] Krugman, P. (2018). *International trade: Theory and policy (11th edition)*. United Kingdom: Pearson Education.
- [25] Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2012). *International Economics (9th ed.)*. Essex: Pearson.
- [26] Lau, P. L., Koo, T. T., & Dwyer, L. (2017). Metrics to measure the geographic characteristics of tourism markets: An integrated approach based on Gini index decomposition. *Tourism Management*, 59, 171–181. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.07.019>.
- [27] Lee, J. W., & Wie, D. (2015). Technological change, skill demand, and wage inequality: Evidence from Indonesia. *World Development*, 67, 238–250. doi: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.10.020>.
- [28] Li, H., Goh, C., Zhang Qiu, H., & Meng, F. (2015). Effect of tourism on balanced regional development: A dynamic panel data analysis in Coastal and Inland China. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 20(6), 694–713. doi: <https://doi.org/10.1080/10941665.2014.930055>.
- [29] Li, H., Chen, J. L., Li, G., & Goh, C. (2016). Tourism and regional income inequality: Evidence from China. *Annals of Tourism Research*, 58, 81–99. doi: <https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.02.001>.
- [30] Loungani, M. P., Mishra, M. S., Papageorgiou, M. C., & Wang, K. (2017). World trade in services: evidence from a new dataset. *IMF Working Paper WP/17/77*. International Monetary Fund. Diakses 3 Maret 2018 dari <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/03/29/World-Trade-in-Services-Evidence-from-A-New-Dataset-44776>.
- [31] Maulida, E. (2003). Analisis dampak pengeluaran wisatawan terhadap distribusi pendapatan dan perekonomian di Propinsi Bali (pendekatan model Miyazawa). *Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- [32] Peluffo, A. (2015). Foreign direct investment, productivity, demand for skilled labour and wage inequality: An analysis of Uruguay. *The World Economy*, 38(6), 962–983. doi: <https://doi.org/10.1111/twec.12180>.
- [33] Petit, S. (2016). International trade in services and inequalities: Empirical evaluation and role of tourism services. *MPRA Paper*, 75206. Munich Personal RePEc Archive. Diakses 18 Desember 2017 dari <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75206/>.
- [34] Petit, S. (2017). International trade in services and inequalities: Empirical evaluation and role of tourism services. *Tourism Economics*, 23(5), 1069–1075. doi: <https://doi.org/10.1177/2F1354816616672361>.
- [35] Pi, J., & Zhang, P. (2018). Factor-biased public infrastructure and wage inequality. *Review of Development Economics*, 22(3), e79–e94. doi: <https://doi.org/10.1111/rode.12393>.
- [36] Pi, J., & Zhou, Y. (2012). Public infrastructure provi-

- sion and skilled–unskilled wage inequality in developing countries. *Labour Economics*, 19(6), 881–887. doi: <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2012.08.007>.
- [37] Putri, N. P. V. S., & Natha, I K. S. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1), 41–49.
- [38] Raychaudhuri, A., & De, P. (2016). Trade, infrastructure and income inequality in selected Asian countries: An empirical analysis. In Roy M., & Sinha Roy S. (eds), *International Trade and International Finance* (pp. 257–278). Springer, New Delhi. doi: https://doi.org/10.1007/978-81-322-2797-7_12.
- [39] Raza, S. A., & Jawaaid, S. T. (2013). Terrorism and tourism: A conjunction and ramification in Pakistan. *Economic Modelling*, 33, 65–70. doi: <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.03.008>.
- [40] Raza, S. A., & Shah, N. (2017). Tourism growth and income inequality: does Kuznets Curve hypothesis exist in top tourist arrival countries. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 22(8), 874–884. doi: <https://doi.org/10.1080/10941665.2017.1343742>.
- [41] Raza, S. A., Sharif, A., Wong, W. K., & Karim, M. Z. A. (2017). Tourism development and environmental degradation in the United States: Evidence from wavelet-based analysis. *Current Issues in Tourism*, 20(16), 1768–1790. doi: <https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1192587>.
- [42] Scheyvens, R. (2002). Backpacker tourism and third world development. *Annals of Tourism Research*, 29(1), 144–164. doi: [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(01\)00030-5](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(01)00030-5).
- [43] Shaw, G., & Williams, A. M. (2004). *Tourism and tourism spaces*. SAGE Publications Ltd. doi: <http://dx.doi.org/10.4135/9781446220528>.
- [44] stata.com. (2005). *Regress postestimation time series*. Diakses 6 Desember 2018 dari <https://www.stata.com/manuals13/rregresspostestimationtimeseries.pdf>.
- [45] Taylor, J. E., Hardner, J., & Stewart, M. (2009). Ecotourism and economic growth in the Galapagos: an island economy-wide analysis. *Environment and Development Economics*, 14(2), 139–162. doi: <https://doi.org/10.1017/S1355770X08004646>.
- [46] UNWTO. (2017). *UNWTO tourism highlights, 2017 edition*. The United Nations World Tourism Organization. Diakses 17 Juni 2018 dari <http://www2.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2017>.
- [47] Wahyuni, I. G. A. P., Sukarsa, M., & Yuliarmi, N. (2014). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(8), 458–477.
- [48] Zaman, K., Shahbaz, M., Loganathan, N., & Raza, S. A. (2016). Tourism development, energy consumption and Environmental Kuznets Curve: Trivariate analysis in the panel of developed and developing countries. *Tourism Management*, 54, 275–283. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.12.001>.
- [49] Zulfiu-Alili, M. (2014). Inward foreign direct investment and wage inequality in Macedonia. *Eastern European Economics*, 52(5), 56–86. doi: <https://doi.org/10.1080/00128775.2014.1004265>.